

Aksi Boikot Tionghoa Surabaya: Perjuangan Ekonomi dan Nasionalisme Tiongkok Tahun 1930-1942

Martinus Danang Pratama Wicaksana

Mahasiswa Program Studi Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Maters, Mirjam. 2003. *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan 1906-1942*. Jakarta: Hasta Mitra, Utan Kayu, KITLV.

Nawiyanto. 2010. *Mata Hari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang-Cina*. Yogyakarta: Ombak.

Kedua buku ini memberikan gambaran mengenai kelompok Tionghoa di Surabaya pada masa depresi 1930. Kelompok Tionghoa di Surabaya dikenal sebagai kelompok yang pandai dalam berdagang. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya suku Hokkian yang datang di Surabaya. Kota ini juga dijadikan pemerintah Hindia Belanda sebagai kota perdagangan sehingga tidak mengherankan bahwa Surabaya banyak dikenal oleh kalangan pedagang. Bahkan ketika masa depresi 1930, Surabaya juga terdampak sehingga secara perekonomian banyak dari kalangan Tionghoa maupun bumiputera yang merugi.

Akibat dari krisis ekonomi tahun 1930 di Surabaya terjadi pergolakan yang cukup menyita perhatian pemerintah Hindia Belanda. Aksi boikot pedagang-pedagang Tionghoa terhadap barang-barang buatan Jepang menjadi aksi yang cukup diperhatikan oleh pemerintah. Pada masa tersebut bumiputera lebih memilih barang-barang buatan Jepang karena harganya yang dijual murah dibandingkan dengan barang-barang yang dijual oleh pedagang Tionghoa. Hal ini membuat kelompok Tionghoa tidak terima dengan apa yang dilakukan Jepang sehingga membuat kelompok Tionghoa merugi besar.

Aksi boikot yang dilakukan oleh kelompok Tionghoa ini kemudian tidak hanya disebabkan karena masalah krisis ekonomi, melainkan ada faktor lain. Pendudukan Jepang di Tiongkok daratan pada tahun 1931 juga menjadi pemicu kelompok Tionghoa di Surabaya untuk melakukan aksi boikot. Kemudian diperparah dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh surat kabar Tionghoa-Melayu untuk membakar amarah kelompok Tionghoa untuk membenci Jepang.

Buku yang pertama yakni *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras* menjawab bahwa pengaruh surat kabar memberikan efek yang cukup besar dalam menjalankan aksi. Surat kabar Tionghoa-Melayu memberitakan pendudukan Jepang di Tiongkok dan kekejaman Jepang terhadap masyarakat Tionghoa. Pemberitaan ini cukup berhasil dan memberikan semangat anti Jepang. Efek dari pemberitaan ini kemudian juga menyeret surat kabar Tionghoa-Melayu pada pembreidelan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Buku yang kedua yakni *Mata Hari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang-Cina* menjawab tentang asal-usul terjadinya boikot para pedagang Tionghoa terhadap barang-barang Jepang di Surabaya. Persaingan dagang antara kedua bangsa ini bermula dari krisis ekonomi 1930 yang melanda Hindia Belanda. Masyarakat bumiputera pada masa krisis ini kemudian lebih memilih barang-barang Jepang dibandingkan barang-barang Tionghoa karena harganya yang lebih murah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gejolak persaingan perdagangan antara kedua belah pihak ini.

Mengapa Tionghoa Surabaya?

Secara umum Surabaya sudah dikenal sebagai salah satu dari pusat perdagangan pada masa kolonial Hindia Belanda. Tidak jarang di kota ini terdapat aktivitas perdagangan yang dilakukan baik oleh orang Eropa, timur asing, dan bumiputera sendiri. Kawasan yang strategis dan secara historis Surabaya sudah menjadi pusat perdagangan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini kemudian yang membuat masyarakat tertarik untuk berdagang di Surabaya.

Ketertarikan Surabaya sebagai pusat perdagangan juga sudah dikenal oleh kelompok Tionghoa. Mereka yang datang ke Hindia Belanda dari tanah Tiongkok daratan secara individu hanya termotivasi untuk berdagang di Surabaya sehingga dapat meraup keuntungan yang cukup besar. Bahkan di Surabaya pada kemudian juga terdapat Kampung Tionghoa yang dibangun pada masa kebijakan *Wijkenstelsel* atau surat jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah kebijakan tersebut dihapuskan maka banyak orang-orang Tionghoa kemudian secara bebas tinggal di luar dari Kampung Tionghoa.

Surabaya juga dikenal sebagai salah satu pusat dalam perpolitikan di Hindia Belanda saat itu. Para pendiri bangsa lahir dan berkembang di Surabaya seperti H.O.S. Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam, Soekarno, Liem Khoen Hian, dan lain sebagainya. Bahkan di Surabaya juga menjadi tempat lahirnya Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1930 yang menjadi salah satu tonggak perjuangan Tionghoa di Hindia Belanda.

Perpolitikan Tionghoa di Surabaya dapat dikatakan memiliki dinamika yang beragam karena perbedaan pandangan mengenai identitas. Apalagi Surabaya sebagai tempat lahirnya PTI di mana mereka lebih memilih untuk mendukung bumiputera dan sama-sama berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan kelompok Tionghoa yang beraliran pada Tiongkok daratan yang diwakili oleh kelompok *Sin Po* dan beraliran pada Belanda yang diwakili *Chung Hwa Hui*.

Hal ini kemudian menjadi menarik untuk melihat Tionghoa Surabaya untuk penulis bahas dalam esai ini. Satu sisi kelompok Tionghoa di Surabaya cukup banyak dan

beragam tidak hanya yang berasal dari kaum pedagang saja. Namun, pada sisi yang lain kelompok Tionghoa ini juga terpengaruh pada dinamika politik yang diperjuangkan oleh para nasionalis Indonesia. Akibatnya identitas politik Tionghoa pun terpecah di beberapa tempat.

Perjuangan Ekonomi Berujung Aksi Boikot

Buku yang berjudul *Mata Hari Terbit dan Tirai Bambu: Persaingan Dagang Jepang-Cina* karya Nawiyanto ini menggambarkan tentang persaingan dagang Jepang dengan Tionghoa pada masa depresi. Buku ini memberikan secara garis besar asal-usul dan dampaknya persaingan perdagangan Jepang dengan Tionghoa. Bahkan persaingan perdagangan antara kedua negara ini kemudian akan berkembang pada aksi-aksi boikot yang dilakukan pedagang Tionghoa di Surabaya.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pedagang Tionghoa dari tahun ke tahun selalu terjadi lonjakan penduduk Tionghoa yang bermigrasi ke Hindia Belanda. Mereka selalu memilih kota-kota perdagangan sebagai wilayah tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena motivasi mereka yang datang karena perdagangan. Bahkan Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari banyaknya komunitas Tionghoa yang hadir untuk melakukan aktivitas jual-beli.

Sebelum masa depresi komunitas Tionghoa memiliki peranan yang cukup penting dalam perdagangan di Hindia Belanda. Mereka adalah para perantara antara pedagang Eropa dengan pedagang bumiputera. Hal ini kemudian memberikan keuntungan yang berlebih bagi para pedagang Tionghoa karena dengan begitu dapat memberikan pendapatan yang besar. Pedagang Tionghoa yang dikenal ulet membuat keuntungan makin berlipat ganda sehingga secara ekonomi beberapa pedagang Tionghoa lebih berada.

Namun, ketika masa depresi komunitas Tionghoa mengalami kemunduran ekonomi bahkan dapat dikatakan merugi. Hal ini dijelaskan dalam bab III di mana masa depresi ini komunitas Tionghoa dihadapkan pada persaingan perdagangan dengan Jepang. Ekspansi barang-barang impor Jepang ke Hindia Belanda membuat perekonomian komunitas Tionghoa makin tersudutkan.

Ketika masa depresi tahun 1930 melanda Hindia Belanda membuat upah tenaga kerja bumiputera makin minim. Hal ini berakibat pada beberapa barang yang dijual oleh komunitas Tionghoa tidak laku dibeli oleh pembeli bumiputera. Sedangkan pada masa itu terjadi ekspansi barang-barang buatan Jepang cukup besar dan dijual murah. Hal ini kemudian membuat masyarakat bumiputera beralih dari barang-barang Tionghoa ke barang-barang Jepang.

Hal ini kemudian direspon oleh komunitas Tionghoa karena merasa dirugikan oleh ekspansi barang-barang Jepang di Hindia Belanda. Mereka kemudian melancarkan aksi-aksi boikot terhadap barang-barang Jepang agar bumiputera dapat membeli barang-barang pada komunitas Tionghoa. Bagi komunitas Tionghoa mereka tidak menyetujui cara yang dilakukan orang Jepang terutama pada masa depresi yang membuat mereka makin merugi.

Aksi boikot pedagang Tionghoa terhadap barang-barang Jepang di Surabaya merupakan salah satu aksi yang dilakukan dalam memperjuangkan ekonomi komunitas Tionghoa. Hal ini disebabkan karena cara yang dilakukan Jepang membuat komunitas Tionghoa di Hindia Belanda makin lama makin terpuruk perekonomiannya. Bahkan aksi ini kemudian disusupi oleh isu pendudukan Jepang di Tionghoa yang kemudian membuat kebencian orang Tionghoa dengan orang Jepang makin menyebar ke Hindia Belanda.

Nasionalisme Tionghoa Lewat Surat Kabar

Buku yang berjudul *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras* karya Mirjam Maters berisikan tentang pemberangusan pers yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Dalam Bab VI Nasionalisme dan Netralitas tahun 1931-1942 akan dijelaskan mengenai surat kabar Tionghoa-Melayu pada masa itu mereka mempropagandakan nasionalisme Tionghoa lewat surat kabar. Bahkan secara terang-terangan mereka melancarkan sikap anti Jepang yang berujung pada pemberangusan surat kabar oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pemberitaan surat kabar Tionghoa-Melayu di Hindia Belanda pada tahun 1930an dipandang sebagai aksi sepihak yang dilakukan kelompok Tionghoa kepada kelompok Jepang. Tidak mengherankan pada masa itu surat kabar Tionghoa-Melayu dipenuhi oleh berita-berita tentang pendudukan Jepang di Tiongkok daratan. Hal ini menjadi *chaos* antara pihak Tionghoa dengan pihak Jepang di Hindia Belanda akibat dari pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar.

Pihak pemerintah Hindia Belanda tidak ingin terjadi keributan atas masalah yang menimpa Asia Timur antara Jepang dengan Tiongkok. Bagi mereka masalah Jepang dengan Tiongkok merupakan masalah dua bangsa yang diselesaikan di dua negara masing-masing tidak di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan kebijakan netralitas atas apa yang terjadi dengan Jepang dan Tiongkok. Mereka tidak ingin membela atau berpihak pada salah satu bangsa karena akan berakibat buruk ditambah lagi dengan krisis ekonomi pada tahun itu.

Namun, kebijakan netralitas yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak digubris oleh surat kabar Tionghoa-Melayu. Dalam bab VI buku ini dijelaskan bahwa pada tahun 1936 sampai 1942 terjadi perang opini antara surat kabar Tionghoa-Melayu dengan harian *Java Nippo* milik kelompok Jepang. Dalam pemberitaan surat kabar Tionghoa-Melayu mereka mengucapkan tentang anti Jepang, kekejaman Jepang di Manchuria, dan lain sebagainya.

Pemerintah Hindia Belanda tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan kelompok Tionghoa kepada kelompok Jepang ini. Bagi pemerintah Hindia Belanda apabila perang opini dalam surat kabar ini dibiarkan akan terjadi kerusuhan antara kelompok Tionghoa dengan kelompok Jepang. Hal ini kemudian masalah di Asia Timur akan semakin meluas sampai ke Hindia Belanda.

Menjadi menarik pada masa tersebut surat kabar Tionghoa-Melayu yang melancarkan propaganda anti Jepang tidak hanya dilakukan oleh surat kabar milik totok saja yang sudah jelas membela tanah airnya. Namun, surat kabar milik peranakan pun juga sama-sama membela tanah airnya Tiongkok daratan sehingga pada peristiwa ini totok dan peranakan pun bersatu dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Hal ini disebabkan karena Jepang tidak hanya merugikan kelompok Tionghoa di Tiongkok saja, namun juga kelompok Tionghoa di Hindia Belanda.

Bagi pemerintah Hindia Belanda apa yang dilakukan oleh surat kabar Tionghoa-Melayu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka kemudian memberangus surat kabar-surat kabar Tionghoa-Melayu yang sudah diberikan peringatan namun tetap saja masih menyebarkan sikap anti Jepang. Pada tahun 1936 sampai 1940 diterangkan dalam buku terjadi pemberangusan pers Tionghoa-Melayu yang cukup banyak pada tiap tahunnya dibandingkan dengan pers bumiputera, pers Eropa, dan pers Jepang.

Buku ini menerangkan bahwa alasan pemerintah Hindia Belanda memberangus pers Tionghoa-Melayu karena sikap anti Jepang yang dilancarkan dalam surat kabar. Pernyataan seperti “musuh yang kejam”, “rencana-rencana licik”, “tirani”, “kebiadaban”, “perdagangan perempuan”, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh pernyataan

dalam surat kabar Tionghoa-Melayu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat kelompok Tionghoa makin tidak suka dengan sikap pemerintah dan merasa pemerintah sebagai kolaborator kelompok Jepang.

Menulis Ulang Historiografi Tionghoa

Penulisan ulang historiografi Tionghoa di Hindia Belanda perlu dikembangkan lagi apalagi setelah masa reformasi ini. Sebelumnya historiografi Tionghoa selalu mendapatkan porsi sedikit. Sejarawan seperti Leo Suryadinata, Onghokham, dan lain-lain merupakan generasi terdahulu yang menuliskan sejarah Tionghoa serta membuka kaca mata tentang perjuangan mereka yang dahulu dibungkam karena rezim otoriter.

Melihat kedua buku di atas yang menjelaskan tentang historiografi Tionghoa di Surabaya menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya sebatas melihat dari sisi dalam Indonesia. Kedua buku di atas menunjukkan bahwa sejarah Indonesia juga ditentukan oleh faktor di luar wilayah Indonesia. Aksi boikot pedagang Tionghoa terhadap barang-barang Jepang di Surabaya tidak hanya berhenti pada masalah di Hindia Belanda melainkan terdapat faktor dari peristiwa di Asia Timur.

Sebagai catatan penutup, perlu penulisan ulang historiografi Tionghoa oleh generasi-generasi yang baru. Hal ini perlu digalakkan karena setiap generasi akan menuliskan sejarahnya sendiri. Bahkan penulisan historiografi Indonesia perlu juga dikembangkan untuk melihat peristiwa sejarah dunia dalam kaitannya dengan sejarah Indonesia. Hal ini selaras dengan pesan dari Benedict Anderson dalam memoarnya yang berjudul *Hidup di Luar Tempurung*, bahwa sejarawan jangan sampai terjebak menjadi katak dalam tempurung.